

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, *Hukum Paten dan perundang-undangan Paten Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992.
- Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Poerwanto, Djoko *Komunikasi Bisnis*. Jakarta, , Erlangga, 1996.
- Saleh, Roeslan, *Seluk-Beluk Praktis Lisensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Subekti, R. *Aspek-aspek Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sutopo, H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian UNS, Surakarta, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Peneltian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Soebroto, Thomas, Tanya Jawab Ketentuan Mengenai Paten dan Lisensi, Semarang, Effar Offsed. 1991.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tentang Paten*, Citra Umbara, Bandung, 2001.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Citra Umbara, Bandung, 2001.

SIKAP DISIPLIN HUKUM DALAM MASYARAKAT



OLEH:

Rima Adhi Pratiwi	C 100 040 093 (A)
Ristiawan	C 100 010 058 (C)
Bambang Sutopo	C 100 010 022 (E)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

A. Judul: SIKAP DISIPLIN HUKUM DALAM MASYARAKAT

B. Pendahuluan

Setiap daerah, tempat berkumpulnya anggota masyarakat dalam kegiatannya untuk berhubungan dengan orang lain atau lembaga memerlukan hukum, sebab hukum dapat dipergunakan sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat. Sarana untuk melakukan *social engineering* dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan tertentu di dalam masyarakat, atau untuk mengendalikan keadaan. Kadang-kadang orang ingin menggunakan perundang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata.¹

Adanya dua fungsi hukum dalam masyarakat tersebut dan guna dapat dilaksanakan seseuai dengan fungsinya, bagi masyarakat perlu adanya sikap untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hukum. Sikap disiplin dalam hukum saat sekarang ini masih kurang disadari oleh banyak orang. Hal ini dapat dilihat di media elektronik atau dibaca di media cetak, dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran hukum. Mulai dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran besar. Contohnya pelanggaran lalu lintas, ada tanda lampu merah banyak orang yang tetap jalan,

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa 1993, hal. 130.

orang membeli tiket banyak yang tidak antri. Adapun pelanggaran yang lebih tinggi seperti banyak orang melakukan korupsi. Semua pelanggaran-pelanggaran terjadi karena kurangnya kesadaran masing-masing individu dalam mentaati peraturan. Oleh sebab itu, sikap disiplin hukum atau mentaati hukum penting dilakukan pembudayaan.

Pembudayaan kedisiplinan diperlakukan bagi segenap masyarakat. Setiap individu diharapkan secara ikhlas dan dengan penuh kesadaran mentaati semua peraturan yang diwujudkan dalam sikap perilaku disertai rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga perwujudan sikap sebagai individu dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam makalah ini akan dikaji tentang sikap kedisiplinan sebagai sarana pembudayaan hukum.

C. Pembahasan

Hukum dan sikap disiplin mempunyai hubungan yang erat. Hukum tanpa adanya sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat maka akan ketidakteraturan dalam kegiatan. Disiplin sebagai perwujudan tata aturan perilaku, disiplin merupakan bagian yang amat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengertian disiplin menurut Subari (1994: 164) adalah “Penurutan terhadap suatu peraturan dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya suatu peraturan”. Adapun kedisiplinan adalah “latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatan selalu menaati tata tertib

dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama”.² Lebih jelas Oteng Sutisna menguraikan pengertian disiplin sebagai berikut:³

- a. Proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan, atau kepentingan demi suatu cita-cita atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif dan dapat diandalkan.
- b. Pencarian cara-cara bertindak yang terpilih dengan gigih, aktif, dan diarahkan sendiri, sekalipun menghadapi rintangan atau gangguan.
- c. Pengendalian perilaku seseorang dengan langsung dan otoriter melalui hukuman atau hadiah.
- d. Secara negatif pengekanan setiap dorongan, sering melalui cara yang tidak enak, menyakitkan.
- e. Suatu cabang ilmu pengetahuan.

Dari beberapa kutipan tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kedisiplinan adalah latihan batin atau watak seseorang melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertibann dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya suatu peraturan dengan gigih, aktif, dan diarahkan sendiri, sekalipun menghadapi rintangan atau gangguan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Pengertian disiplin dibedakan menjadi dua yaitu disiplin positif atau konstruktif dan disiplin negatif atau hukuman. Disiplin positif melibatkan

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1992.

³ Oteng Sutisna, *Pendidikan Kedisiplinan*, Jakarta, Eresco, 1999, hal. 17

penciptaan suatu sikap dan iklim organisasi di mana para anggotanya mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku atas kemauan sendiri. Baik secara perseorangan atau kelompok patuh kepada tata tertib, karena mereka memahami, menyakini dan mendukungnya, semua itu dilakukan karena memang dikehendaki. Sedangkan disiplin negatif adalah disiplin yang menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Seseorang atau kelompok melakukan tindakan disiplin bukan atas kesadarannya sendiri melainkan ada sebab lain, yaitu takut akan sanksi-sanksi atau hukuman yang akan diterima apabila tidak melakukan kegiatan tersebut.⁴

Disiplin atau kedisiplinan akan membuat seseorang atau kelompok tahu dan dapat membedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan atau yang tidak sepatutnya dilakukan, karena merupakan hal-hal yang dilarang. Bagi seorang yang berdisiplin, karena sudah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, namun sebaliknya akan membebani dirinya apabila ia tidak berbuat disiplin. Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupan seseorang/kelompok.

Sesuai dengan peringkat manusia (individu, kelompok, masyarakat, bangsa), disiplin dapat dipilah dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Disiplin pribadi sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan atas aturan-aturanyang mengatur perilaku individu.

⁴ Ibid.

- b. Disiplin kelompok sebagai perwujudan disiplin yang lahir dari sikap taat patuh terhadap aturan-aturan (hukum) dan norma-norma yang berlaku pada kelompok atau bidang-bidang kehidupan manusia.
- c. Disiplin nasional yakni wujud disiplin yang lahir dari sikap patuh yang ditunjukkan oleh warga negara terhadap aturan-aturan, nilai yang berlaku secara nasional.⁵

Sementara itu hukum dibuat sebagai suatu aktivitas yang bersifat formal yuridis. Dalam pandangan ini maka ia dilihat sebagai suatu aktivitas untuk merumuskan secara tertib, menurut prosedur yang ditentukan dan menjadi sesuai dengan kehendak masyarakat. Dengan demikian maka ukuran-ukuran yang dipakai untuk menilai pekerjaan lembaga perundang-undangan ini adalah bersifat normatif, yaitu apakah ia bersesuaian dengan norma-norma hukum yang mengatur tentang peranan dan kegiatannya. Tetapi hukum dapat pula didekati dari sudut sosiologi, yang terutama melihat kedudukan dan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, maka akan diamati hubungan timbal balik antara lembaga dan aktivitas perundang-undangan dengan masyarakat di mana ia berada.

Tujuan pembudayaan sikap disiplin hukum

- a. Melahirkan dan membentuk sikap berdisiplin dan bertanggung jawab serta peka dengan peraturan dan undang-undang.
- b. Melahirkan orang yang mengenal dan menilai diri sendiri dan orang lain secara rasional dan bijaksana.

⁵ D. Soemarmo, *Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Tata Tertib Sekolah*, Jakarta, Mini Jaya Abadi, 1998, hal. 111.

- c. Melahirkan orang yang menyayangi dan menghormati diri sendiri, orang lain dan menghargai alam sekitar.
- d. Melahirkan orang yang bersemangat tinggi, berilmu, berketerampilan serta menjadikan sebagai landasan menuju ke arah kecemerlangan hidup.
- e. Meningkatkan mutu disiplin sebagai asas ke arah pembentukan warga negara yang bertanggung jawab.

D. Kesimpulan

Sikap disiplin hukum atau mentaati hukum penting dilakukan pembudayaan. Pembudayaan kedisiplinan diperlakukan bagi segenap masyarakat. Setiap individu diharapkan secara ikhlas dan dengan penuh kesadaran mentaati semua peraturan yang diwujudkan dalam sikap perilaku disertai rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga perwujudan sikap sebagai individu.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Soemarmo, *Pedoman Pelaksanaan Disiplin Nasional dan Tata Tertib Sekolah*, Jakarta, Mini Jaya Abadi, 1998.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992.
- Oteng Sutisna, *Pendidikan Kedisiplinan*, Jakarta, Eresco, 1990
- Subari, *Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa 1993

RINGKASAN

Hukum dalam masyarakat dapat dipergunakan sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Oleh sebab itu, sikap disiplin hukum atau mentaati hukum penting dilakukan pembudayaan.

Pembudayaan kedisiplinan diperlakukan bagi segenap masyarakat. Setiap individu diharapkan secara ikhlas dan dengan penuh kesadaran mentaati semua peraturan yang diwujudkan dalam sikap perilaku disertai rasa tanggung jawab yang tinggi.

Sesuai dengan peringkat manusia (individu, kelompok, masyarakat, bangsa), maka sikap disiplin berdasar pada sikap disiplin individu, masyarakat, dan bangsa. Adapun tujuan pembudayaan sikap disiplin hukum

- a. Melahirkan dan membentuk sikap berdisiplin dan bertanggung jawab serta peka dengan peraturan dan undang-undang.
- b. Melahirkan orang yang mengenal dan menilai diri sendiri dan orang lain secara rasional dan bijaksana.
- c. Melahirkan orang yang menyayangi dan menghormati diri sendiri, orang lain dan menghargai alam sekitar.
- d. Melahirkan orang yang bersemangat tinggi, berilmu, berketerampilan serta menjadikan sebagai landasan menuju ke arah kecemerlangan hidup.
- e. Meningkatkan mutu disiplin sebagai asas ke arah pembentukan warga negara yang bertanggung jawab.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan diri decara disiplin hukum. Menurut D. Sumarmo (1994: 21) disiplin pada tingkat individu mempunyai tiga aspek yang perlu diperhatikan, yaitu (1) pemahaman, (2) sikap mental dan (3) perilaku. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan dan norma, yang menumbuhkan kesadaran dan ketaatan pada aturan, norma, kriteria atau standar, yang merupakan syarat untuk mencapai keberhasilan. Sikap mental (*mental attitude*), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak. Perilaku yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib.

Seorang individu dalam melakukan suatu kegiatan penting untuk memahami secara mendalam apa yang akan dilakukannya. Dalam kedisiplinan yang perlu dipahami adalah suatu aturan sistem aturan dan norma, ketaatan pada aturan, norma, kriteria atau standar, atas kesadaran

yang timbul dari dalam diri sendiri. Hal ini merupakan syarat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Setiap orang dalam kehidupan memiliki masalah yang harus dipecahkan, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan akan timbul kesulitan-kesulitan yang mengakibatkan konflik batin, mental dalam keadaan terganggu. Agar mental sehat perlu dilakukan usaha. Usaha tersebut menurut Kartini Kartono (2000: 4) meliputi (1) menyeimbangkan jiwa, (2) menegakkan kepribadian yang terintegrasi dengan baik dan (3) mampu memecahkan segala kesulitan hidup dengan kepercayaan diri dan keberanian. Apabila tiga usaha tersebut dapat dilakukan oleh seorang individu, maka individu tersebut akan memiliki sikap mental yang baik. Sikap mental yang baik dalam kedisiplinan membuat individu memiliki kesadaran terhadap tindakan yang harus dilakukan dan dilarang oleh peraturan.

Disiplin sebagai suatu “tatakrama” perilaku menuntut pembinaan dan upaya penanaman melalui proses belajar. Dengan demikian perlu ditempuh melalui jalur pelatihan dan pengarahan serta jalur keteladanan. Untuk jalur pelatihan memerlukan perancangan strategi dan materi yang dapat mendekatkan perbedaan pandangan tentang pengertian disiplin. Sedangkan pengarahan perlu dicari metode pendekatan yang mengarah pada pembujukan (Suparno, 2003 : 8).

Disiplin lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang dalam suatu sistem nilai budaya yang telah ada di dalam masyarakat, sementara

nilai budaya masyarakat tersebut tercipta dari sistem norma yang dianut oleh sekelompok manusia. Dengan demikian unsur pokok yang membentuk disiplin adalah (1) norma dan sikap dalam diri manusia dan (2) nilai budaya yang ada dalam masyarakat kemudian dikembangkan sikap disiplin dengan cara :

- a. *Start wit yourself* = mulai dari diri sendiri
- b. *Start early* = sesegera mungkin
- c. *Start small* = sedikit demi sedikit
- d. *Star now* = lakukan sekarang (Oteng Sutisna, 1990: 124)

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan diri secara disiplin pada diri individu, yaitu yaitu (1) pemahaman, mengenai sistem aturan dan norma, yang menumbuhkan kesadaran dan ketaatan pada aturan, norma, kriteria atau standar untuk mencapai keberhasilan (2) sikap mental, sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan pengendalian watak dan (3) perilaku, yang merupakan. Perilaku yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. Setelah itu melaksanakan disiplin mulai dari diri sendiri, sesegera mungkin tanpa menunda, dilakukan sedikit demi sedikit dan melakukan saat sekarang.

4. Hal yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kedisiplinan

Masalah disiplin merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang. Tanpa adanya kedisiplinan yang besar di dalam setiap individu, maka individu tersebut akan kesulitan dalam mencapai tujuan.

Agar kedisiplinan menjadi suatu kesadaran tiap orang menurut Suparno (2003: 37) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kedisiplinan, yaitu meliputi :

a. Pembudayaan kedisiplinan

Pembudayaan kedisiplinan diperlakukan bagi segenap masyarakat terlebih-lebih bagi siswa sekolah. Secara ikhlas dan dengan penuh kesadaran, mentaati semua peraturan yang diwujudkan dalam sikap perilaku disertai rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga perwujudan sikap sebagai siswa dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Hohnholz, Jurgen H. 1996. Alih Bahasa: Thomas Rieger dan Sonny Keraf. A. *Geografi Pedesaan Masalah Pengembangan Pangan*. Jakarta: Karya Unipress.

Persyaratan formal pengajuan permohonan paten diatur dalam Pasal 24 UUP 2001, yang menyatakan bahwa permohonan paten harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- d. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan untuk dapat diberi paten;
- f. pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
- g. judul Invensi;
- h. klaim yang terkandung dalam Invensi. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi;
- i. deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
- j. gambar teknik yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi; dan
- k. abstrak Invensi, yaitu ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UUP 2001 dijelaskan pengertian kata *teknologi yang diungkapkan sebelumnya*, meliputi:

- a. teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas;
- b. mencakup dokumen permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah tanggal penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi tanggal penerimaan tersebut lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan.

Lembaga Pusat Pembudayaan Pendidikan

Budaya dari bahasa Sanskerta *buddhayah*, yang berarti “budi” atau “akal”, dalam perkembangannya di Indonesia menjadi budidaya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal (Koentjoroningrat, 1993: 9). Sedangkan Edward B. Taylor yang dikutip oleh Tilaar (2000: 39) dalam bukunya *Primitive Culture* menyatakan :

Budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Jadi, budaya adalah keseluruhan yang kompleks berhubungan dengan akal budi dalam kehidupan seseorang sebagai anggota masyarakat, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan lain dihasilkan oleh manusia. Dengan demikian maksud dari nilai budaya adalah merupakan nilai yang ada dan berkembang di dalam kehidupan manusia berhubungan dengan akal, perasaan dan kehendak.

Konsep-konsep nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian warga masyarakat membentuk sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia, dalam tingkatan yang paling abstrak. Sistem-sistem tata kelakuan dalam tingkatan lebih konkrit seperti aturan-aturan khusus, norma-norma berpedoman pada sistem budaya. Sistem budaya demikian kuat meresap dalam jiwa warga masyarakat sehingga sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu yang singkat (TIM IBD, 1993 : 9).

Koentjaraningrat (1993: 9) mengemukakan pendapatnya apabila perwujudan budaya itu penekanannya pada tiga unsur (akal, perasaan dan kehendak) secara bersamaan, maka akan timbul kebudayaan yang berbeda dalam kelompok manusia. Artinya kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Dengan kata lain bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya. Jadi kebudayaan merupakan produk dari budaya.

Pendapat tersebut dilanjutkan oleh Ki Hajar Dewantoro (dalam Tilaar, 2000: 43) tentang konsep kebudayaan yang berarti buah budi manusia, yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang sangat kuat yaitu alam dan zaman (kodrat dan masyarakat). Dalam perjuangan tersebut terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Dalam kebudayaan nasional mengandung beberapa pengertian penting, yaitu (1) kebudayaan bersifat kebangsaan (nasional dan mewujudkan sifat atau watak kepribadian bangsa, (2) tiap-tiap kebudayaan menunjukkan keindahan dan tingginya adat kemanusiaan pada hidup masing-masing bangsa yang memilikinya, (3) tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap kekuatan alam dan memudahkan serta memajukan taraf kehidupan.

Menurut kerangka Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1993: 28-30) seorang ahli antropologi membagi sistem budaya dalam lima masalah, yaitu :

- a. Hakekat hidup manusia.
- b. Hakekat karya manusia.
- c. Hakekat kehidupan manusia dalam ruang waktu.
- d. Hakekat hubungan manusia dengan alam.
- 5) Hakekat manusia dengan sesamanya.

Berdasarkan sistem budaya tersebut, maka nilai budaya dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu (1) nilai religius atau agama, (2) nilai ilmu pengetahuan dan estetika, (3) nilai sosial, (4) nilai ekonomi, dan (5) nilai politi (Munandar Sulaeman, 1995: 83). Sedangkan pendapat Tilaar (2000: 43) nilai ilmu pengetahu dibedakan dengan nilai estetika. Dengan demikian nilai budaya dikelompokkan menjadi 6 macam dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Nilai religius atau agama

Agama merupakan tempat mencari makna hidup yang final, kemudian agama yang diyakini tersebut merupakan sumber motivasi tindakan individu dalam hubungan sosialnya. Setiap kelompok manusia mempunyai mempunyai latar nilai sosial yang berbeda sesuai dengan agama yang dianutnya. Timbulnya hubungan dua arah sosial dan agama akan mempengaruhi tindakan manusia.

b. Nilai ilmu pengetahuan

Ilmu menurut Jujun S. Suriasumantri yang dikutip oleh Sulaiman (1995: 170) dapat dipandang sebagai produk atau proses dan sebagai paradigma etika. Ilmu dipandang sebagai proses karena merupakan hasil kegiatan sosial, yang berusaha memahami alam, manusia dan perilakunya baik secara individu atau kelompok.

c. Nilai Estetika

Estetika sering dikaitkan dengan nilai atau moral, yaitu suatu perbuatan yang dipandang baik dan jelek, yang dijalankan dan dilarang, sehingga perilaku kehidupan seseorang dapat diterima di tengah-tengah masyarakat karena sesuai dengan peraturan yang ada dalam masyarakat di mana individu tinggal.

d. Nilai sosial

Dalam kehidupan masyarakat ada pelapisan sosial karena perbedaan ekonomi dan kemampuan individu sebagai kriterianya. Artinya menganggap ada sesuatu yang dihargai dapat berupa uang atau benda-benda bernilai ekonomis, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesolehan dalam agama atau keturunan dari keluarga terhormat.

e. Nilai ekonomi

Ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan dari permasalahan sosial yang merupakan tantangan zaman. Artinya setiap suatu kebijakan diterapkan, akan muncul permasalahan baru. Masalah dalam perekonomian terjadi pada kemiskinan massal, kemakmuran yang tidak

seimbang, kepincangan-kepincangan ekonomi regional, pemakaian tidak rasional sumber-sumber alam yang tidak dapat dipulihkan. Masalah ekonomi pada kemiskinan massal dan kemakmuran yang tidak seimbang mengakibatkan hubungan sosial dalam masyarakat kurang harmonis.

f. Nilai politik

Politik adalah usaha terorganisasi oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk serta jalannya kebijaksanaan umum secara demokratis. Sebagai warga negara yang baik perlu untuk berpartisipasi dalam politik untuk kepentingan bersama.

Menurut pendapat Beals dan Hoyer (dalam Tilar, 2000: 38), bahwa kebudayaan diturunkan kepada generasi penerus lewat proses belajar melalui dengan cara melihat dan meniru tingkah laku orang lain. Namun demikian kebudayaan bukanlah tingkah laku, yang dipelajari adalah cara bertindak. Cara bertindak manusia dalam lingkungan kebudayaan tertentu mengikuti pola-pola ideal atau pola-pola budaya. Pengertian ini penting, sebab manusia bukan hanya asal meniru cara kelakuan manusia lainnya, melainkan manusia harus dapat memanfaatkan akan budinya untuk menciptakan, menertibkan dan mengelola nilai-nilai insani tersebut. Setiap kebudayaan itu unik dan terus berkembang, tidak ada kebudayaan yang statis.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kebudayaan diturunkan kepada generasi penerus lewat proses belajar dan belajar itu sendiri dapat diperoleh oleh setiap manusia dengan melalui pendidikan. Untuk itu ada baiknya dipahami tentang hakekat pendidikan.

Hakekat pendidikan menurut Tilaar (2000 : 28) adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat dan membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional serta global. Mengenai hakekat pendidikan tersebut terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

a. Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan

Proses pendidikan yang berkesinambungan berarti bahwa manusia tidak akan pernah selesai, pendidikan berhenti ketika peserta didik telah dewasa tetapi akan terus-menerus berkembang selama terdapat interaksi antara manusia dengan lingkungan sesama manusia serta dengan lingkungan alamnya.

b. Proses pendidikan berarti menumbuhkembangkan eksistensi manusia

Eksistensi atau keberadaan manusia adalah suatu keberadaan interaktif dan interaksi ini terjadi sepanjang hayat hidup manusia, termasuk komponen dalam menumbuhkembangkan eksistensi manusia adalah dorongan, keinginan dan tujuan yang ingin dicapai.

c. Eksistensi manusia yang memasyarakat

Proses pendidikan adalah proses mewujudkan eksistensi manusia yang memasyarakat, sekurang-kurangnya ada unsur-unsur ibu, orang tua, pendidik formal dan pendidik nonformal.

d. Proses pendidikan dalam masyarakat yang membudaya

Inti dari kehidupan manusia adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut perlu dilestarikan, dikembangkan dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Keseluruhan proses tersebut adalah kebudayaan, dengan demikian tidak mungkin masyarakat tanpa budaya.

e. Proses bermasyarakat dan membudaya mempunyai dimensi-dimensi waktu dan ruang

Dimensi waktu merupakan proses yang mempunyai aspek historis, kekinian dan visi masa depan. Aspek historis berarti suatu masyarakat telah berkembang dalam proses waktu. Aspek kekinian artinya suatu budaya tidak tertutup dari dunia luar dan aspek visi masa depan adalah teknologi komunikasi cakrawala baru dalam kehidupan bersama manusia.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menyimak keterkaitan antara proses pendidikan dan proses pembudayaan menurut Tilaar (2000: 39-40) adalah:

- a. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan yang kompleks, bukan suatu kesatuan atau bagian-bagian.
- b. Kebudayaan merupakan suatu prestasi kreasi manusia yang material, misalnya: ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni dan sebagainya.
- c. Kebudayaan dapat pula berbentuk fisik, terbentuknya kelompok-kelompok keluarga.

- d. Kebudayaan dapat berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti hukum, adat-istiadat yang berkesinambungan.
- e. Kebudayaan merupakan suatu realitas yang objektif, dapat dilihat.
- f. Kebudayaan diperoleh dari lingkungan.
- g. Kebudayaan tidak berwujud dalam kehidupan yang bersaing di dalam suatu masyarakat.

Dari kutipan tersebut secara jelas menguraikan tentang keterkaitan antara proses pendidikan dan proses pembudayaan dalam kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat. Pendidikan dan pembudayaan bersama-sama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Ki hajar Dewantoro yang dikutip oleh Tilaar (2000: 68-70) bahwa pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dengan alasan :

- a. Kebudayaan merupakan alasan atau dasar pendidikan yang meliputi seluruh aspek pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.
- b. Kebudayaan menjadi alasan pendidikan bersifat kebangsaan. Salah satu tugas pendidikan nasional adalah ikut membangun kebudayaan kebangsaan Indonesia.
- c. Pendidikan mempunyai arah, yaitu untuk mewujudkan perikehidupan seluruh aspek kehidupan manusia.
- d. Arah tujuan pendidikan adalah untuk mengangkat derajat individu, masyarakat dan negara.

e. Pendidikan yang visioner, yaitu pendidikan nasional tidak terlepas dari upaya untuk kerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Pendidikan sebagai sumbangan kebudayaan merupakan hal penting baik untuk individu, kelompok masyarakat ataupun suatu bangsa dalam meningkatkan peradaban manusia. Dunia pendidikan perlu dipacu secara berencana dan terarah untuk melahirkan manusia-manusia yang sadar, terdidik dan berkualitas.

Dalam pengertiannya manusia yang berpendidikan dengan manusia yang berbudaya mempunyai arti yang berbeda. Menurut Tilaar (2000: 128) manusia yang berpendidikan adalah manusia yang telah berkembang kemampuan intelektualnya karena pendidikan formal (sekolah). Sedangkan manusia yang berbudaya adalah seseorang yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etis dan moral yang hidup dalam kebudayaan tersebut. Seseorang dapat saja berpendidikan tinggi dan luas tetapi hidupnya tidak bermoral. Dalam hal ini orang tersebut berpendidikan tetapi tidak berbudaya, misalnya tidak mempunyai tata krama yang berlaku dalam suatu daerah atau orang tersebut sering melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, banyak merugikan banyak orang.

C. SIMPULAN

Sekolah bukanlah lembaga pendidikan yang dapat dijadikan pusat pembudayaan sebagai ajang bisnis seperti saat sekarang ini yang sedang

hangat-hangat sekolah dijadikan budaya bisnis. Terutama sebagai pendidik atau orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan harus dapat menjadikan sekolah sebagai lembaga pusat pembudayaan pendidikan. Oleh sebab itu bagi pendidik dan orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan harus dapat menempatkan sekolah sebagai lembaga pendidikan dan sekolah sebagai lembaga pusat pembudayaan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan

Sekolah merupakan pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, agar siswa dapat mengembangkan segenap kemampuannya untuk hidup dalam masyarakat dan untuk memenuhi syarat dalam melanjutkan studi yang lebih tinggi sesuai dengan tujuan tiap jenjang pendidikan (SD SMP, dan SMU/SMK). Tujuan pendidikan tiap jenjang pendidikan berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional dan kurikulum.

2. Sekolah sebagai lembaga pusat pembudayaan pendidikan

Proses pendidikan dan proses pembudayaan dalam kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat. Pendidikan dan pembudayaan bersama-sama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

Pendidikan sebagai sumbangan kebudayaan merupakan hal penting baik untuk individu, kelompok masyarakat ataupun suatu bangsa dalam meningkatkan peradaban manusia. Dunia pendidikan perlu dipacu secara berencana dan terarah untuk melahirkan manusia-manusia yang sadar, terdidik dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubroto, Dalil. 1987. *Pandangan Tentang Nilai-nilai Sosial*. Bandung : Rosda Karya.
- Ahmadi, Abu. dan Widodo Supriyono. 1991. *Psikologi Belajar* . Jakarta : Bhineka Cipta.
- Depdikbud. 1999. *Undang-undang Pendidikan RI Tahun 1998*. Jakarta : Depdikbud.
- Ekosusilo, Madyo dan R.B. Kasihadi. 1991. *Dasar-dasar Pendidikan*. Semarang : Effhar Publising.
- Gunarsa, Singgih. D.. 1997. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Gunarsa, Yulia Singgih D dan Singgih D. Gunarsa. 2000. *Psikologi untuk Membimbing*. Jakarta : BPK Gunung Agung.
- Kontjaraningrat. 1993. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mustaqim. 2001. *Psikologi Pendidikan*. Semarang. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Riyanto, Theo. 2002. *Pembelajaran sebagai Proses Bimbingan Pribadi*. Jakarta : Grasindo.
- Sulaiman, Munandar. 1995. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Enreco.
- Suparno, Paul, R. Rohadi, G Sukadi, dan St. Kartono. 2003. *Reformasi Pendidikan Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta; Kanisius.
- Tilaar, H.A. 2000. *Pendidikan Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung : Rosdakarya.
- Triyanto, Bambang. 1995. *Pemahaman Kurikulum*. Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara.

